

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KONVERSI LAHAN DI PROVINSI JAMBI

(Analysis of Determining Factors of Land Conversion in Jambi Province)

***Titin Lorenza Barus, Indri Nelvia B Siregar, Pupili Rhadiallah**

Program Magister (S2) Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: ratna.dian@bku.ac.id

ABSTRAK: Konversi lahan merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab alih fungsi lahan di Provinsi Jambi. Data sekunder dari tahun 2011 hingga 2020 yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi pemerintah digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan faktor utama dalam konversi hutan di wilayah tersebut. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.904, variabel jumlah penduduk, PDRB, dan luas perkebunan kelapa sawit secara signifikan memengaruhi luas hutan secara bersama-sama. Sementara itu, sekitar 9.6% variasi dalam konversi lahan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis ini.

Kata Kunci: Lahan, Alih Fungsi Lahan, Provinsi Jambi, Penyebab Alih Fungsi Lahan, Faktor Penentu Konversi Hutan.

ABSTRACT: *Land conversion is an inevitable phenomenon to meet human needs and improve the quality of life, even though it has the potential to cause negative impacts on the environment and land resources. This research aims to analyze the causes of land conversion in Jambi Province. Secondary data from 2011 to 2020 collected from various official government sources was used in this research. The results of the analysis show that population growth, increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP), and expansion of oil palm plantations are the main factors in forest conversion in the region. With a coefficient of determination (R^2) of 0.904, the variables of population, GRDP, and oil palm plantation area significantly influence forest area together. Meanwhile, around 9.6% of the variation in land conversion is influenced by other factors not included in this analysis model.*

Keywords: *Land, Land Conversion, Jambi Province, Causes of Land Conversion, Determining Factors of Forest Conversion.*

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya (Farhani & Chandranegara, 2019). Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang paling penting dalam menopang setiap aktivitas dan kehidupan manusia, baik sebagai sumberdaya yang dapat diolah, maupun sebagai penopang aktivitas lainnya seperti kawasan industri, lokasi perkebunan sawit, kawasan perumahan, sarana publik, daerah rekreasi, dan lain sebagainya (Putra dkk., 2018). Secara kuantitas, lahan bersifat tetap, sedangkan permintaan terhadap lahan terus meningkat. Hal ini dipicu oleh penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, kegiatan ekonomi, dan migrasi dari wilayah lain maupun wilayah hinterland di wilayah yang bersangkutan, yang mendorong terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan.

Lahan sebagai salah satu faktor produksi merupakan sumber hasil-hasil pertanian yang menjadi tempat proses produksi dan hasil produksi diperoleh. Dalam pertanian, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia, faktor produksi lahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima dari lahan dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Bagi petani, lahan memiliki arti yang sangat penting karena dari lahan mereka dapat mempertahankan hidup bersama keluarganya melalui kegiatan bercocok tanam dan beternak. Karena lahan merupakan faktor produksi dalam berusaha tani, maka status penguasaan terhadap lahan menjadi sangat penting yang berkaitan dengan keputusan jenis komoditas apakah yang akan diusahakan dan berkaitan dengan besarnya bagian yang akan diperoleh dari usaha tani yang diusahakan.

Namun sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengalami pembangunan yang ditandai dengan industrialisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja, dan struktur pendapatan petani di pedesaan. Industrialisasi dan penambahan penduduk menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di wilayah ini. Manusia sebagai pengguna lahan utama jumlahnya terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu bahwa alih fungsi lahan berpengaruh terhadap meluruhnya peranan pertanian pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Umar, 2021). Makna lahan pertanian menjadi penorong dalam sulitnya terwujudnya regenerasi petani. Menurut Eriyati dkk (2015); Umar & Dewata (2020) mendefinisikan alih fungsi lahan atau sering disebut konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang memberikan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi dan pusat populasi serta aktivitas ekonomi, dihadapkan pada tantangan besar untuk masa depannya. Salah satu tantangan utamanya adalah menjaga daya saing yang kuat untuk pertumbuhan bersama dengan wilayah sekitarnya, sambil menghadapi perubahan global. Kota Jambi harus membangun wilayahnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan ekonomi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Riau di utara, Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau di timur, Provinsi Sumatera Selatan di selatan, dan Provinsi Sumatera Barat di barat. Posisi geografisnya sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle) (Aly, 20200). Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Darurat No. 19/1957, dan saat ini terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, setelah melalui beberapa pemekaran wilayah administratif. Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 53.435,72 KM² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 KM². Mayoritas penggunaan lahan di luar hutan adalah untuk perkebunan kelapa sawit (26,20%) dan perkebunan karet (19,22%) (Andini, 2023). Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dan terbagi menjadi tiga daerah berdasarkan karakter kompleks ekologisnya: hulu, tengah, dan hilir. Setiap daerah memiliki karakteristik khusus, termasuk keberadaan kawasan lindung di hulu, beragam kegiatan budidaya di tengah, dan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan tangkap di hilir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab alih fungsi lahan di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, memakai data sekunder untuk memperoleh gambaran awal mengenai perkembangan jumlah penduduk, perkembangan besarnya PDRB dan luas perkebunan kelapa sawit. Target yang akan dicapai dilakukan melalui beberapa analisis data diantaranya adalah analisis diskriptif kualitatif dan analisa kuantitatif (Azhari & Umar, 2021; Umar & Pratama, 2023). Dalam penelitian ini untuk menganalisis faktor penentu Konversi lahan di Provinsi Jambi dengan melihat, jumlah penduduk, besarnya PDRB dan luas perkebunan kelapa sawit (Harjanti & Hara, 2020) di Provinsi Jambi. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis statistik yaitu regresi linier berganda. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan : Y = Luas lahan Hutan Pertahun (Ha); β = Konstanta/intersep; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta$ = Parameter masing-masing variabel bebas; X_1 = Jumlah Penduduk (Jiwa); X_2 = Besarnya PDRB (Juta Rupiah); X_3 = Luas Perkebunan kelapa Sawit (Ha); μ = Gangguan (disturbance) (Wijaya et al., 2020)

HASIL

Tabel 1. Perkembangan Luas Hutan di Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2020

Tahun	Luas Hutan (Ha)
2011	696.000
2012	690.400
2013	585.300
2014	580.600
2015	577.300
2016	558.660
2017	551.900
2018	548.600
2019	546.800
2020	545.100

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan luas lahan hutan di Provinsi Jambi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2011 luas lahan hutan di Provinsi Jambi adalah seluas 696.000 Ha, kemudian berkurang menjadi menjadi 545.200 Ha pada tahun 2020.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2011	3.167.578
2012	3.227.096
2013	3.286.070
2014	3.344.421
2015	3.402.052
2016	3.458.926
2017	3.515.017
2018	3.570.272
2019	3.624.579
2020	3.677.894

Sumber: BPS, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Provinsi Jambi yaitu 3.167.578 jiwa mengalami peningkatan setiap tahun dan sampai tahun 2020 yaitu sejumlah 3.677.894 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 86 %.

Tabel 3. PDRB Tanpa Minyak Bumi dan Gas di Provinsi Jambi Tahun 2011-2020

Tahun	PDRB Tanpa Minyak Bumi dan Gas (Juta Rupiah)
2011	97.740.870
2012	104.615.080
2013	111.766.130
2014	119.991.440
2015	125.037.400
2016	130.501.130

Tahun	PDRB Tanpa Minyak Bumi dan Gas (Juta Rupiah)
2017	136.501.710
2018	142.902.000
2019	149.142.590
2020	148.449.870

Sumber: BPS, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 3 di atas, terjadinya peningkatan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tanpa minyak bumi dan gas di Provinsi Jambi dari tahun-ke tahun. Pada tahun 2011 PDRB dengan nilai Rp 97.740.870 dan tahun 2020 menjadi Rp 148.449.870. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan PDRB sebesar 66 %.

Tabel 4. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2011-2020

Tahun	Luas Areal Perkebunan Sawit (Ha)
2011	532.293
2012	589.340
2013	593.433
2014	662.846
2015	714.399
2016	736.095
2017	887.795
2018	1.032.145
2019	1.034.804
2020	1.074.599

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa terjadinya peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Tahun 2011 memiliki luas perkebunan. 532.293 Ha menjadi 1.074.599 Ha pada tahun 2020, artinya dalam jangka waktu lebih kurang sepuluh tahun terjadi peningkatan luas areal perkebunan sawit seluas 50%. Dari perhitungan yang dilakukan melalui program SPSS dengan menggunakan data time series selama 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Olahan Data

Tahun	Luas Hutan (Ha)	Jumlah Penduduk	PDRB Tanpa Minyak Bumi dan Gas (Juta Rupiah)	Luas Areal Perkebunan Sawit (Ha)
2011	696.000	3.167.578	97.740.870	532.293
2012	690.400	3.227.096	104.615.080	589.340
2013	585.300	3.286.070	111.766.130	593.433
2014	580.600	3.344.421	119.991.440	662.846
2015	577.300	3.402.052	125.037.400	714.399
2016	558.660	3.458.926	130.501.130	736.095
2017	551.900	3.515.017	136.501.710	887.795
2018	548.600	3.570.272	142.902.000	1.032.145
2019	546.800	3.624.579	149.142.590	1.034.804
2020	545.100	3.677.894	148.449.870	1.074.599

Sumber: Analisis, 2021.

Berdasarkan hasil regresi di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 924151 + 0.1 X_1 - 0.008 X_2 + 0.345 X_3 + e$$

$$R\text{-squares} = 0,904$$

Dari persamaan regresi linier data diatas dapat dilihat bahwa, tanpa adanya jumlah penduduk, PDRB dan luas areal perkebunan sawit, maka luas lahan hutan di provinsi Jambi berkurang sebesar 924.151 Ha. Sementara itu, dilihat dari nilai R-square, jumlah penduduk, PDRB, dan luas areal perkebunan sawit memiliki pengaruh sebesar 90,4% terhadap pengurangan lahan hutan di Provinsi Jambi dengan analisis sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk: Dalam analisis ini jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi luas lahan hutan di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk menjadi pertimbangan dalam hal berkurangnya luas lahan hutan. Dari persamaan diatas diperoleh nilai koefisien regresi X_1 (jumlah penduduk) sebesar + 0,100, hal ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang negatif antara penambahan jumlah penduduk dengan berkurangnya luas lahan hutan, artinya apabila jumlah penduduk bertambah setiap tahunnya akan menyebabkan berkurangnya luas lahan hutan yang ada di Provinsi Jambi.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): Pertumbuhan ekonomi di lihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas. PDRB merupakan faktor yang mempengaruhi konversi luas lahan hutan setelah jumlah penduduk. Dari persamaan diatas diperoleh nilai koefisien regresi X_2 (PDRB) sebesar - 0.008, hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara PDRB dengan luas lahan hutan Provinsi Jambi, artinya apabila PDRB meningkat setiap tahunnya, terjadi peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, akan menyebabkan luas lahan hutan berkurang semakin meningkat.
3. Luas areal perkebunan sawit: Faktor penentu konversi luas lahan hutan di Provinsi Jambi adalah penambahan luas areal perkebunan sawit. Dari persamaan diatas di peroleh nilai koefisien regresi X_3 (luas areal perkebunan sawit) sebesar + 0.345, hal ini menunjukkan hubungan yang negative antara luas areal perkebunan sawit dengan luas lahan hutan, artinya terjadi penambahan luas areal perkebunan sawit setiap tahunnya, menyebabkan berkurangnya luas lahan hutan setiap tahun.

Dari persamaan regresi linier diatas dapat dilihat bahwa, tanpa adanya jumlah penduduk, PDRB dan luas areal perkebunan sawit, maka luas lahan hutan di provinsi Jambi berkurang sebesar 924.151 Ha. Sementara itu, dilihat dari nilai R-square, jumlah penduduk, PDRB, dan luas areal perkebunan sawit memiliki pengaruh sebesar 90,4% terhadap pengurangan lahan hutan di Provinsi Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan luas areal perkebunan sawit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan luas lahan hutan di Provinsi Jambi. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, luas lahan hutan akan mengalami penurunan sebesar 924.151 Ha. Analisis koefisien regresi menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk dan luas areal perkebunan sawit berhubungan negatif dengan luas lahan hutan, sementara PDRB memiliki hubungan positif. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengelola ekonomi dengan bijaksana, dan mengatur ekspansi perkebunan sawit dapat membantu dalam pelestarian lahan hutan di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, M. D. (2020). *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Proses Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Andini, A. (2023). *Haji Hanafie dalam Pusaran Politik Jambi 1950-1960* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Azhari, M. F., & Umar, I. (2021). Evaluasi Kemampuan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 2(1), 51-59.
- Eriyati, E., Rosyety, R., & Sari, L. (2015). Analisis faktor-faktor penentu konversi lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 134-142.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235-254.
- Harjanti, L. T., & Hara, Y. (2020). The Determinants of Paddy Fields Conversion in Java and Sumatra [Faktor-Faktor Penentu Konversi Luas Lahan Sawah di Jawa dan Sumatera]. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 39-52.
- Putra, A., Triyatno, T., Syarief, A., & Hermon, D. (2018). Penilaian erosi berdasarkan metode usle dan arahan konservasi pada das air dingin bagian hulu Kota Padang-Sumatera Barat. *Jurnal Geografi*, 10(1), 1-13.
- Umar, I., & Dewata, I. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Umar, I. (2021). Arahan Kebijakan Untuk Mengurangi Dinamika Penggunaan Lahan pada DAS Antokan, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 11(1), 10-18.
- Umar, I., & Pratama, R. (2023). Policy Model of Degraded Land Control in the Anai Watershed West Sumatra Province-Indonesia. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 7(2), 121-127.
- Wijaya, O., Widodo, W., Lathifah, R., Rahmawati, N., & Rubiyanto, C. W. (2020). Household dietary patterns in food insecurity areas. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 6(2), 168-180.